

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bertambahnya tahun secara umum kehidupan masyarakat secara keseluruhan juga mengalami perkembangan, baik perkembangan dalam hal yang lebih baik ataupun dalam hal yang sebaliknya. Perkembangan masyarakat yang menjadi lebih modern ini juga menjadikan gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju, namun semakin maju dan modernnya gaya hidup masyarakat seakan kurang mendasari gaya hidupnya dengan pengetahuan, khususnya pengetahuan mengenai agama dan norma-norma yang ada dan yang berlaku di masyarakat yang berkemungkinan dapat menimbulkan pengaruh atau dampak negatif terhadap perkembangan masyarakat itu sendiri. Norma-norma dan nilai keagamaan yang dahulunya sangat dipegang teguh dan ditaati oleh masyarakat sekarang menjadi dikesampingkan atau diabaikan dengan alasan utama yaitu moneter.

Dalam kehidupan masyarakat yang sekarang sudah tidak asing lagi dengan yang dinamakan prostitusi, pada dasarnya prostitusi merupakan tindakan yang berlawanan atau yang bertolak belakang dengan norma-norma yang ada di masyarakat, baik dalam norma agama maupun norma sosial. Kurang kuatnya mental masyarakat dalam menghadapi perkembangan kehidupan yang semakin modern membuat terjadinya praktek prostitusi, dimana orang yang melakukan praktek prostitusi tersebut dikenal dengan sebutan pekerja seks komersial (PSK). Hal ini dilakukan karena berbagai alasan atau faktor yang mendasari seseorang

menjadi pekerja seks komersial (PSK), salah satu faktor utama seseorang melakukan praktek prostitusi adalah faktor ekonomi demi dapat mencapai gaya hidup yang lebih modern dan lebih maju lagi.

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-stituere” yang artinya adalah membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata “prostitute” merujuk pada kata keterangan yang berarti wanita tuna susila. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wanita tuna susila adalah seorang yang celaka atau perihal menjual diri atau orang sundal. Prostitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut sebagai wanita tuna susila yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan pekerja seks komersial (PSK).¹

Pada dasarnya seorang perempuan tidak ada yang menginginkan dirinya untuk menjadi seorang pekerja seks komersial atau pelacur, karena setiap orang mengerti bahwa pelacuran atau praktek pekerja seks komersial merupakan pekerjaan yang nista dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Kehidupan pada suatu waktu, dimana seks dan soal-soal yang berhubungan dengan itu menjadi peranan penting.²

¹ Kondar Siregar. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Perdana Mitra Handalan. Hal : 1-3

² Kartono. 2003. *Kenakalan Remaja*. Jakarta. Raja Grafindo. Hal : 7.

Semakin lama praktek prostitusi ini semakin banyak tersebar di masyarakat besar, baik masyarakat kota-kota besar maupun masyarakat kabupaten. Hal ini dikarenakan bisnis praktek prostitusi dianggap sebagai bisnis yang begitu menghasilkan, disamping lebih banyaknya praktik prostitusi yang dilakukan juga praktik prostitusi pada era sekarang ini dilakukan secara terang-terangan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, tentunya dengan cara yang beragam. Salah satu cara yang dilakukan yaitu praktik prostitusi yang berkedok warung remang-remang.

Hukum positif Indonesia telah mengatur sanksi pidana bagi masyarakat yang menjalankan atau membuka praktik pekerja seks komersial (PSK) ini, dimana aturan tersebut sudah secara jelas dan tegas dituliskan pada Pasal 506 KUHP yang berbunyi “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pacarian diancam hukuman paling lama satu tahun”.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah yang terdapat praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK), beberapa faktor menjadi dasar akan terjadinya praktik pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Lamongan. Faktor yang paling utama adalah faktor ekonomi, dimana masyarakat terpengaruhi akan kenaikan kebutuhan hidup demi untuk dapat menunjang kehidupannya sehari-hari, hal tersebut berdampak pada masyarakat Kabupaten Lamongan baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan Kabupaten lamongan. Jadi beberapa masyarakat melakukan atau menjalankan praktek-praktek yang pada dasarnya menyimpang dari norma agama, norma kesusilaan, dan termasuk pada pelanggaran hukum baik dalam hal melakukan atau menjalankan praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK) maupun menyediakan tempat untuk sarana melangsungkan praktik prostitusi

tersebut. Dalam terjadinya praktik prostitusi ini banyak didalamnya yang terlibat adalah perempuan dengan berbagai kalangan usia yaitu dari yang tua sampai yang muda.

Demi untuk menanggulangi permasalahan praktik prostitusi, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan peraturan untuk mencegah berkembangnya dan memberantas secara keseluruhan praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK) tersebut, peraturan tersebut tercantum pada PERDA Nomor 05 Tahun 2007 Kabupaten Lamongan tentang Pemberantasan Pelacuran Di Kabupaten Lamongan. Namun meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang tindak prostitusi tersebut, masih banyak ditemukan beberapa praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK) di daerah Kabupaten Lamongan. Hal ini secara jelas merupakan tindak perlawanan terhadap peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pada tanggal 9 Januari 2019 Satpol PP Kabupaten Lamongan meringkus 6 (enam) perempuan Pekerja Seks Komersial di sebuah tempat prostitusi yang berada di Desa Lohgung dan Cikara Kecamatan Brondong Kabupaten lamongan. Untuk memastikan adanya praktik prostitusi Pekerja Seks Komersial itu, petugas Satpol PP sebelumnya melakukan penyelidikan dan pengintaian hingga sepekan. Menurut Kasi Ops dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Lamongan, Bambang Yustiono, semua wanita penghibur laki-laki hidung belang itu diamankan saat baru saja membuka tempat atau warung yang dijadikan untuk melayani esek-esek. “setelah menerima laporan dari masyarakat sekitar, kami kemudian melakukan penyelidikan selama sepekan” kata Bambang.

Dalam pemeriksaan Satpol PP tersebut, terungkap pula bahwa para PSK tersebut mematok tarif antara Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) hingga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sekali kencan. “tarif itu sudah termasuk sewa kamar” ungkap Bambang. Dan ditempat tersebut ternyata setahun yang lalu tepatnya di tahun 2018 sudah pernah digerebek, namun tidak membuat mereka jerah dengan adanya bukti mereka kembali membuka praktik prostitusi Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut, “Makanya kami akan mengambil langkah yang tegas dengan mengejar mucikarinya” pungkas Bambang.³

Tema yang diangkat oleh penulis sebelumnya sudah pernah diteliti oleh peneliti lain yaitu, Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Sugianto pada bulan Desember 2019 dengan judul “Implementasi Perda Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan” yang membahas tentang cara mengatasi pelacuran berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan, ada beberapa cara yang dijelaskan yaitu dengan cara penanggulangan secara pereventif yang dimana penanggulangan pereventif ini diharuskan dalam beberapa bentuk, kemudian dengan cara penanggulangan secara represif, yaitu usaha yang dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (mengurangi) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Slamet Sugianto dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti penanggulangan pekerja seks komersial di kabupaten lamongan. Dan **perbedaanya** adalah peneliti Slamet

³ (SURYA.co.id-LAMONGAN-Enam perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) diciduk satpol PP Kabupaten Lamongan, Rabu (9/1/2019) sore.

Sugianto melakukan penelitian penaggulangan pekerja seks komersial dengan berdasar pada Perda Kabupaten Lamongan yang lama yaitu Perda No. 10 Tahun 2004 Kabupaten Lamongan, sedangkan yang akan penulis akan melakukan penelitian dengan berpatokan pada Perda Kabupaten Lamongan yang baru yaitu Perda No. 05 Tahun 2007 Kabupaten Lamongan.⁴ Dalam Perda No. 10 Tahun 2004 tidak dijelaskan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pelacuran secara lengkap, dimana dalam Pasal 11 ayat (1) Perda No. 10 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 2, pasal 6 dan pasal 7 diancam tindak pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000; (Lima Puluh Juta Rupiah).” Sedangkan didalam Pasal 6 ayat 1 Perda No. 05 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, diancam dengan pidana kurungan minimal satu setengah bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda minimal Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).” Dari perbandingan pasal penjatuhan pidana kedua Perda tersebut dapat dilihat bahwa Perda Nomor 05 Tahun 2007 dibuat untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan.

Dari penjelasan latar belakang diatas yang sudah dipaparkan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK) yang ada di Kabupaten lamongan belum terlaksana

⁴ <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/847/686>

sepenuhnya dengan baik, karena masih ditemukanya praktik prostitusi yang terjadi sebagaimana contoh kasus yang sudah penulis lampirkan diatas. Maka disini saya sebagai penulis ingin membahas dan meneliti lebih dalam lagi tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Lamongan dalam bentuk penulisan ilmiah atau skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERDA NOMOR 05 TAHUN 2007 KABUPATEN LAMONGAN DALAM PRAKTEK PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KABUPATEN LAMONGAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara penegakan hukum dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Lamongan berdasarkan PERDA Nomor 05 tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Lamongan berdasarkan PERDA No. 05 Tahun 2007 Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis cara penegakan hukum dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Lamongan berdasarkan PERDA Nomor 05 Tahun 2007 tentang pemberantasan pelacuran di Kabupaten Lamongan.

2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai Media pembelajaran hukum lebih lanjut khususnya dalam bidang penegakan hukum pidana pekerja seks komersial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan individu mahasiswa dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti sendiri, khususnya mengenai penegakan hukum pidana dalam penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Peneliti dapat menemukan berbagai persoalan mengenai penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK), bagaimana cara yang strategis dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK), kemudian hambatan dalam pelaksanaan pembinaan pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Lamongan.

b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan dan pandangan terhadap masyarakat dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Lamongan.

c. Bagi instansi

Dapat dijadikan bahan masukan bagi Instansi khususnya bagi kepolisian dalam menegakan hukum pidana untuk menggulangi pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Lamongan.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Seorang awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.⁵

Metode yang akan saya gunakan dalam penelitian untuk skripsi ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sebenarnya merupakan tataran penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh atau keseluruhan,

⁵ Bambang Sunggono. 2014. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta. PT Sinar Grafika. Hal:33.

sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka dengan menggunakan pendekatan kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.⁶

a. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan secara maksimal dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁷ Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis, metode pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara langsung dengan cara melakukan observasi secara langsung pada obyeknya⁸ yaitu melihat secara langsung ketentuan PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 05 tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran di kabupaten lamongan juga melihat secara langsung yang terjadi dilapangan.

b. Pendekatan penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan kondisi yang dilakukan selama metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan

⁶ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Catatan Kelima*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal:41

⁷ Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal : 42.

⁸Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. Hal: 51

system, sedangkan konsisten berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.⁹

Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

Secara yuridis pekerja seks komersial dikaitkan dengan Bab III Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2007 tentang pemberantasan pelacuran di kabupaten Lamongan. Karena secara sosiologis pekerja seks komersial dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat. Maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis yang dimana suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan atau situasi dalam keadaan nyata yang ada di masyarakat dan dalam lingkungan masyarakat dengan tujuan dan maksud untuk memperoleh fakta (*fact finding*), menemukan masalah yang sedang terjadi (*problem finding*), kemudian melakukan identifikasi masalah (*problem identification*), dan pada akhirnya melakukan proses penyelesaian masalah (*problem solution*). Pendekatan hukum yuridis sosiologis ini penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan secara langsung dengan penegakan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran Di Kabupaten lamongan tersebut

⁹ Soerjono Soekanto. 2005. Sosiologi : *Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal : 42.

dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung dan terpercaya perihal permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dalam penegakan hukum penanggulangan pekerja seks komersial khususnya di Kabupaten Lamongan.

c. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Mengacu pada lokasi, ini bisa pada wilayah tertentu atau suatu Lembaga tertentu dalam masyarakat yang khusus mengenai masalah tersebut. Lokasi dalam penelitian ini adalah dinas sosial, satpol pp, lokasi prostitusi pekerja seks komersial (PSK) dan juga tempat warung remang-remang yang ada di Kabupaten Lamongan.

Alasan penulis memilih lokasi di Kabupaten Lamongan karena di Kabupaten Lamongan mempunyai aturan pelanggaran adanya praktek prostitusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan, tetapi dalam kenyataanya masih banyak adanya praktek prostitusi di kawasan Kabupaten Lamongan dengan berkedok warung remang-remang.

d. Data dan sumber data

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan oleh penulis sebagai data pokok dalam melakukan penulisan skripsi ini, adapun sumber data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumbernya secara langsung atau dari sumber pertama, yaitu dengan cara mempelajari warga masyarakat setempat yakni dengan melalui penelitian.¹⁰ Sumber data primer dapat diperoleh penulis dengan cara melakukan wawancara dengan pihak – pihak yang terkait atau yang bersangkutan dengan obyek penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Lamongan. Sumber data utama yang dapat diperoleh penulis merupakan hasil yang didapat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis yaitu kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan oleh penulis secara terarah, sadar dan tentunya bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh informasi dan data yang diperlukan dan yang diperoleh dari informan. Adapun informan tersebut adalah :

- a. Kantor instansi satpol pp Kabupaten Lamongan
- b. Dinas sosial Kabupaten Lamongan

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku atau literatur dan peraturan perundang-undangan, adapun data sekunder tersebut meliputi :

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo. Hal : 12.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dikarenakan dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis, disini penulis menggunakan bahan hukum primer PERDA Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran Di Kabupaten Lamongan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara secara mendalam dan secara umum merupakan sebuah proses guna mendapatkan keterangan secara jelas untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara penulis dengan narasumber atau informan, baik dengan menggunakan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis ini ditujukan kepada narasumber atau pihak yang terkait secara langsung dan berkompeten. Wawancara juga dilakukan dengan pedoman wawancara yang disusun oleh penulis dan pertanyaan pada saat

wawancara dapat berkembang sesuai dengan jawaban dari narasumber.

Adapun narasumber yang dituju oleh peneliti dalam penelitian penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial ini adalah :

- 1) Kasi Penegakan PERDA di Satpol PP Kabupaten Lamongan.
- 2) Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

b) Studi pustaka

Data yang diperoleh penulis merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang berdasar dari peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran Di Kabupaten Lamongan, buku-buku, dokumentasi resmi, dan hasil dari penelitian yang diperoleh penulis dari instansi yang terkait.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menerapkan atau menggunakan sistematika penulisan untuk mempermudah pemahaman terhadap penulisan skripsi ini, dimana sistematika tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu bagian awal, bagian isi/pokok, bagian penutup. Dimana 3(Tiga) bagian tersebut terdiri atas 4(empat) bab, yaitu :

1. Bagian awal

Dalam penulisan skripsi ini di bagian awal terdiri atas sampul, lembar pengesahan, lembar motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

2. Bagian pokok

Dalam bagian pokok/isi dari penulisan skripsi ini terdapat 3(Tiga) bab didalamnya, yaitu BAB I, II, dan III

a. BAB I Pendahuluan

Pada BAB I skripsi ini penulis menjelaskan latar belakang yang menjadi dasar pemikiran bagi penulis dalam menentukan inti permasalahan atau pokok permasalahan dalam kajian penulisan skripsi ini, selanjutnya penulis juga menjelaskan mengenai permasalahan yang menjadi objek kajian penulisan skripsi ini. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan dan menguraikan tentang apa yang menjadi tujuan penulis dalam menuliskan permasalahan tersebut pada skripsi ini, dan juga menguraikan manfaat dari penulisan skripsi ini, serta metodologi penulisan yang diterapkan atau digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi atau tugas akhir ini. Dan pada bagian akhir dari BAB I ini ditutup dengan penjelasan tentang sistematika penulisan skripsi ini dari setiap bagian dan bab dari skripsi ini.

b. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada BAB II ini penulis memaparkan dan menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar atau landasan oleh penulis yang meliputi teori penegakan hukum, prostitusi, tindak pidana, PERDA Nomor 5 Tahun 2007 Kabupaten Lamongan.

c. BAB III

Pada BAB III ini penulis menjelaskan serta menjabarkan semua hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan pembahasan mengenai penegakan hukum dari PERDA Nomor 5 Tahun 2007 Kabupaten Lamongan beserta dengan hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum PERDA Nomor 5 Tahun 2007 Kabupaten Lamongan tersebut.

3. Bagian penutup

Pada bagian penutup ini terdiri atas kesimpulan dan saran yang dikemas oleh penulis didalam BAB IV, yang kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini.